

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BIDANG  
SOSIAL EKONOMI DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN  
KUANTAN TENGAH, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Sebagai salah satu syarat untuk untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos)  
pada program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial*



**OLEH :**

**YESI OKTORIA**  
**NPM. 170411079**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM  
MENINGKATKAN SOSIAL EKONOMI DI  
DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN  
KUANTAN TENGAH KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI

NAMA : YESI OKTORIA

NPM : 170411079

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

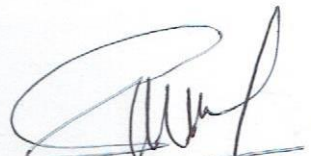
Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si  
NIDN. 1002059002

PEMBIMBING II



SARJAN M, S.Sos.,M.Si  
NIDN.1008128002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos, M.Si  
NIDN.1002059002

## LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 12  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2021

### Tim Penguji

Ketua



Zul Ammar, SE, ME  
NIDN.1020088401

Sekretaris



Sarjan S.Sos., M.Si  
NIDN. 1005108901

1. Emilia Emharis, S.sos., M.Si
2. Sarjan M, S.Sos., M.Si
3. Desriadi, S.Sos., M.Si
4. Sahri Muharam, S.Sos., M.Si



( )  
( )  
( )  
( )

Mengetahui

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Dekan,

Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si  
NIDN. 1030058402

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya skripsi dengan judul “ **upaya pemerintahan desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di desa pulau baru kopah kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singing**” yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana strata I (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Hasil skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dan lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun diperguruan tinggi atau instansi manapun. Kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 12 oktober 2021

Yang membuat pernyataan



**ESI OKTORIA**  
**170411079**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BIDANG SOSIAL EKONOMI DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**OLEH :**

**YESI OKTORIA**  
**NIM : 170411079**

*Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang social ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan bidang social ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini adalah penelitiann kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang social ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kkecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 sudah dilaksanakan sebaik mungkin, hanya saja dalam hal perencanaan pemerintahan desa pulau baru kopah belum bisa mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang social ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 sudah dilaksanakan dengan baik.*

***Kata kunci : meningkatkan bidang sosial ekonomi, pemerintah desa***

## **ABSTRACT**

### **THE EFFORTS OF THE VILLAGE GEVERNMENT IN IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC SECTOR IN THE NEW ISLAND VILLAGE OF KOPAH CENTRAL KUANTAN DISTRICT, KUANTAN SINGINGI**

**BY :**

**YESI OKTORIA**

**NIM : 170411079**

*This research was conducted in pulau baru kopah Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. The purpose of this study was to determine the efforts of the village government in improving the socio-economic sector in the new island village of kopah, central kuantan District, kuantan singing Regency. The Formulation of the problem in the research is how the efforts of the village government in improving the socio-economic sector in the new island village of kopah, central kuantan district kuantan singingi Regency. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis approach. This research was conducted using documentation techniques and interviews with parties involved in the efforts of the village government to improve the socio-economic sector in the new island village of kopah, central kuantan district, kuantan singing district in 2021, it has been implemented as well as possible, it's just that in terms of island village government planning kopah has not been able to identify what the community needs in the efforts of the village government to improve the socio-economic sector in the new island village of kopah, central kuantan District, kuantan Singingi District.*

**Keywords : improving the socio-economic sector, village government**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho,rahmat,dan hidayah-nya, sehinga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BIDANG SOSIAL EKONOMI DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATA KUANTAN TENGAH KABUPATENKUANTAN SINGINGI.”**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) Pada prodi administrasi negara fakultas ilmu sosial universitas islam kuantan singingi, guna memperoleh gelar sarjana imu sosial (S,Sos). dalam menulis skripsi ini penulis sadar tidak akan dapat berjalan sendiri sehingga dari berbagai pihak yang menuntun penulis dan memberikan mptivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Nopriadi, S.K.M.,M.Kes Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi,
2. Ibu Rika Ramadhanti S.Ip.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuntan Singingi.
3. Bapak Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan Staf Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial.
7. Terimah kasih kepada keluargaku yang aku sayangi, dan paling terbaik yang ku miliki, terutama Ayahanda tersayang (Haidir), Ibunda tercinta (Mursida) yang selalu memberikan doa, support,serta motivasi. Abang yang aku sayangi (Helmi syaprilis, ST) yang tidak pernah bosan memberikan support, perhatian baik moril maupun materil.

8. Terima kasih kepada sahabat sahabat saya yang telah mensupport dan yang menjadi *good listener* atas keluh kesah yang saya alami.
9. Terimah kasih kepada teman teman seperjuangan Program Studi Administrasi Negara angkatan 2017

Dalam penulisan penyusunan skripsi penelitian ini, penulis masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang membangun selalu diharapkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga proposal ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum,Wr. Wb

Teluk Kuantan, 12 Oktober 2021

Penulis

YESI OKTORIA

## DAFTAR ISI

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                                                     |             |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>                                                |             |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>                                                 |             |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b>                                                 |             |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                     | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                               | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                   | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                 | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                                | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                 |             |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                         | 1           |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                 | 7           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                              | 8           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                             | 8           |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>                                             |             |
| 2.1 Landasan Teori.....                                                  | 10          |
| 2.1.1.Konsep Ilmu Administrasi Negara .....                              | 10          |
| 2.1.2 Administrasi Pembangunan.....                                      | 14          |
| 2.1.3 Teori Organisasi .....                                             | 19          |
| 2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia .....                          | 21          |
| 2.1.5 Teori Perilaku Organisasi .....                                    | 22          |
| 2.1.6 Teori Kebijakan.....                                               | 24          |
| 2.1.7 Konsep Desa .....                                                  | 26          |
| 2.1.8 Pemerintahan Desa .....                                            | 29          |
| 2.1.9 Konsep Peningkatan Sosial Ekonomi.....                             | 39          |
| 2.2 Pengembangan Ekonomi.....                                            | 40          |
| 2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sosial<br>ekonomi ..... | 41          |
| 2.4 Kerangka pemikiran.....                                              | 42          |
| 2.5 hipotesis.....                                                       | 42          |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 2.6 Defenisi Konseptual.....                               | 42 |
| 2.7 Defenisi Operasional.....                              | 43 |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                           |    |
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                  | 45 |
| 3.2 informan penelitian .....                              | 45 |
| 3.3 sumber data penelitian.....                            | 47 |
| 3.4 fokus Penelitian.....                                  | 47 |
| 3.5 lokasi penelitian .....                                | 48 |
| 3.6 Metode Pengumpulan Data .....                          | 48 |
| 3.6.1 observasi .....                                      | 48 |
| 3.6.2 wawancara.....                                       | 48 |
| 3.6.3 dokumentasi .....                                    | 48 |
| 3.6.4 Tringulasi.....                                      | 49 |
| 3.7 metode analisis data.....                              | 49 |
| 3.8 jadwal penelitian.....                                 | 51 |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM</b>                                |    |
| 4.1 sejarah Desa.....                                      | 52 |
| 4.2 luas da Batas Wilayah.....                             | 54 |
| 4.3 Penduduk .....                                         | 54 |
| 4.4 Perekonomian .....                                     | 55 |
| 4.5 Pemerintahan.....                                      | 55 |
| 4.6 Pendidikan.....                                        | 56 |
| 4.7 Kesehatan.....                                         | 57 |
| 4.8 Agama.....                                             | 58 |
| <b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>               |    |
| 5.1 Identitas Responden.....                               | 60 |
| 5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....    | 60 |
| 5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Tingkat Usia... | 61 |
| 5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..  | 62 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                      |    |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                              | Halaman |
|----------------------------------------------|---------|
| Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....      | 85      |
| Lampiran 2. Daftar Wawancara.....            | 88      |
| Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian..... | 94      |
| Lampiran 4. Biodata Peneliti.....            | 95      |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pemerintahan berlangsung dari tataran tinggi sampai pada tataran rendah, salah satu tujuan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam tataran rendah bisa dilihat dari sistem pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa mendasari bahwa Desa memiliki peran penting untuk mensejahterakan masyarakat, terutama melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat. Menurut Komalasari dkk (2009:128) dalam jurnal *public Service Monivation dan Organization Citizenship Behavior* terhadap kinerja pemerintahan menyatakan bahwa:

Upaya untuk meningkatkan kinerja organisasional bisa diawali dengan meningkatkan kinerja individual, dipengaruhi oleh banyak aspek termasuk didalamnya aspek motivasional.

Penyelenggaraan pemerintah desa untuk pembangunan melalui pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah agar kesejahteraan dan ekonomi masyarakat meningkat.

Fasilitas pemerintah melalui pendampingan dan bantuan sosial (bansos), diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya alam sumber daya manusia melalui dana, teknologi dan kearifan lokal untuk mengerjakan sistem perekonomian masyarakat. Sistem pemberdayaan masyarakat melalui

perekonomian diantaranya ketersediaan sumber daya alam diantaranya subsistem distribusi yang menjamin kemudahan akses fisik, peningkatan daya beli, serta menjamin stabilisasi pasokan dan subsistem konsumsi untuk peningkatan kualitas ekonomi dan pengembangannya. Bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dikelola oleh LKD yang berfungsi sebagai layanan modal berupa lembaga layanan kesehatan/posyandu bersama kader gizi dan PKK mampu menggerakkan masyarakat dalam merubah pola pikir tentang pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di tingkat rumah tangga

Bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengolahan hasil SDA akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat dan adanya perubahan pola pikir masyarakat tentang pentingnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam pemberdayaan ekonomi.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi pendahuluan yang sudah diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumber daya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Secara umum Pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan

permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Kemiskinan di sini dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya.

Adapun tujuan dari Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun ketrampilan kepada masyarakat.

Pemberdayaan di Bidang Usaha Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pulau Baru Kopah pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus mampu mengangkat kondisi ekonomi masyarakat miskin yang ada. Dengan memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian.

Dalam hal ini, konsep dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan

pemerintah Desa Pulau Baru Kopah khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya.

Seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya

memiliki ketrampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement* rendah, tidak disiplin).

Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui *affirmative action* (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan *affirmative action* bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang

dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang. Oleh karena itu pemerintahan desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa diharapkan dengan tugas yang cukup berat,

Menurut perda Kuansing Nomor 07 Tahun 2009 tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, Pemerintahan daerah berupaya membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk mengelola dan membangun masing masing

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan, yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengarahan dan pemanfaatan daya dan dana yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan sehingga keberhasilan pembangunan dalam masyarakat selalu ditentukan oleh tersedianya dana keuangan dan manajemen keuangan

tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh peran serta dan respons masyarakat terhadap pembangunan atau dapat disebut sebagai partisipasi masyarakat.

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat di desa

Dalam peraturan Dalam negeri Nomor 112 Tahun 2014 yaitu tentang pemilihan kepala desa, yang mana kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tanggadesanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah

Rendahnya keterampilan masyarakat pulau baru disebabkan atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan pada umumnya kurang bagus. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja, melalui bidang pendidikan.

Namun kenyataanya, pemberdayaan yang ada di Desa pulau Baru Kopah masih dinilai kurang maksimal. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap perekonomian yang ada di masyarakat desa pulau baru.

Dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi belum maksimal, hal ini disebabkan oleh:

1. Pemerintah Desa masih kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakatnya terutama dalam bidang ekonomi seperti, Badan Usaha Milik Desa kurang bisa berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat, karna kurang terlaksana
2. Rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, seperti masih banyaknya angka pengangguran di desa pulau baru dan kebanyakan dari kalangan generasi muda.
3. Rendahnya tingkat kepedulian dari pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakatnya. Contohnya seperti, pengembangan pemberdayaan ekonomi

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Upaya pemerintah Desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi masyarakat di Desa pulau baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi masyarakat di Desa pulau baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **1.4 Manfaat penelitian**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk keilmuan dan pengetahuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat desa pulau baru kopah dalam meningkatkan bidang social ekonomi.

3. Secara Akademis

Secara Akademis penelitian ini adalah untuk syarat dan memenuhi jenjang studi akhir yang sifatnya salam penelitian ilmiah dan berguna untuk mengaktualisasikan ilmu yang pernah didapat selama dibangku perkuliahan

## 1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB 1           Pendahuluan**

Dalam bab ini diurikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II           Landasan Teori**

Landasanteori ini menyangkut referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

### **BAB III          Metode Penelitian**

Pada bab ini penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis dan sumber, data, key informan dan metode pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data serta analisis data

### **BAB IV          Gambaran Umum**

Pada bab ini, membahas tentang sejarah Desa, dan menyajikan hasil analisis, dan mengetahui tentang luas wilayah ,dan kependudukan suatu desa.

### **BAB V           Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Membahas tentang pejabaran hasil analisa, seperi identitas responden,dan identitas informan dalam skripsi

### **BAB VI          PENUTUP**

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari ntugas akhir yang dibuat dan menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori/ Konsep Ilmu Administrasi Negara**

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dan instansi pemerintahan atau suatu perusa

haan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit, menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis menulis, mengetik, korespodensi, kearsipan dan sebagainya. (dalam Ayub, 2007 : 30).

Selain itu menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional (Nawawi, 2009: 33).

Administrasi dalam arti luas adalah suatu keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mendasarkan pada rasio-rasio tetentu, oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian satu tujuan yang telah

ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula (Siagian, 2000 : 674).

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2001 : 14).

Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerja sama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan

Menurut Dwight Waldo mengatakan bahwa administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Syafii, 2003: 33).

Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J. Gordon bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan (dalam Syafii, 2003:33).

Menurut Edward H. Lichfield bahwa administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah yang diorganisir, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (dalam Syafii 2003:33).

Menurut Pffifner dan Presthus yang memberikan penjelasan mengenai administrasi Negara sebagai berikut: ( dalam syafii, 2003:31).

1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Ciri-ciri administrasi Negara disebutkan Thoha (2008:36-38), sebagai berikut:

1. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bias dihindari. Setiap orang dalam hidupnya selalu berhubungan dengan administrasi Negara. Mulai dari lahir sampai meninggal dunia, orang tidak bias melepaskan diri dari sentuhan kegiatan administrasi negara, baik warga Negara ataupun orang asing.
2. Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan.

Hal ini administrasi Negara mempunyai monopoli untuk mempergunakan wewenang dan kekuasaan yang ada padanya untuk memaksa setiap warga Negara mematuhi peraturan-peraturan dan segala perundangan yang telah ditetapkan.

3. Administrasi Negara mempunyai priorotas.

Banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh administrasi Negara. Darisekian banyaknya tersebut tidak lalu semua diborong olehnya. Prioritas diperlukan untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat.

4. Administrasi Negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.

Besar lingkup kegiatan administrasi Negara meliputi seluruh wilayah negar, di darat, dilaut dan di udara.

5. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.

Administrasi Negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi Negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

6. Pelaksanaan administrasi Negara adalah sangat sulit diukur.

Oleh karna kegiatan administrasi Negara sebagiannya bersifat politis dan tujuan diantaranya untuk mencapai perdamaianya, keamanan, kesehatan, pendidikan, keadilan, kemakmuran, pertahanan, kemerdekaan, dan persamaaan, maka hal tersebut tidak mudah untuk diukur.

7. Banyak yang diharapkan dari administrasi Negara.

Dalam hubungan ini terdapat dua standar penilaian. Satu pihak masyarakat menghendaki administrasi Negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di pihak lain administrasi Negara

mempunyai kemampuan, keahlian, dana, dan sumber-sumber lain yang terbatas.

Menurut William H. Newman (dalam Silalahi, 2009:21), administrasi sebagai fungsi menunjukkan keseluruhan tindakan dari sekelompok orang dalam satu kerja sama sesuai dengan fungsi-fungsi tertentu hingga tercapai tujuan. Fungsi yang satu berhubungan dengan fungsi yang lain dalam satu rangkaian tahapan aktifitas.

Fungsi-fungsi yang dimaksud dianggap sebagai *basic process of administration*, yang terdiri dari :

1. Fungsi menentukan apa yang dilakukan (*planning*).
2. Menggolong-golongkan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu rangkaian hubungan (*organizing*).
3. Menyusun orang-orang yang tepat melakukan masing-masing jenis kegiatan (*staffing*).
4. Mengerakan dan memberi intruksi agar kegiatan berlangsung (*directing*).
5. Tindakan mengusahakan agar hasil pelaksanaan relatif sesuai dengan yang diharapkan (*controlling*).

### **2.1.2 Administrasi Pembangunan**

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). *The liang gie* (dalam Pasalog, 2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian

kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang didalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalog (2011:3) administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efesien, efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran yang ditntukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerja sama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Pembangunan menurut Siagan (2009:4) didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa ( *nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari defenisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu yang dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka pamjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang akan dicapai

melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkeinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “ bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut. Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto,2006:4).

Selanjutnya Todaro (dalam Suharto,2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki 3 tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- b. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.

- c. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari pembudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan .

Siagian (2009:5) mendefenisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan ndalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menyartakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efesien.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu Negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan dilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita Negara atau bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan ,menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain yaitu:

- a. Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubagan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik.
- b. Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain seperti ekonomi, social, politik dan lain-lain.

Jika dimasukan administrasi pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayadinata (2006:87) meliputi bidang ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan.

Administrator adalah orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. Ia merumuskan tujuan dan kebijakan yang berlaku umum dan menjadi dasar atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi puncak dalam suatu stuktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan posisi puncak yang dimaksud adalah kepala desa.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun. Menurut Kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakat

dalam iklim demokratis untuk mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan, demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata.

Administrator pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7) kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan di sini adalah untuk memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang diwujudkan dalam program-program pelayanan yang efektif.

### **2.1.3 Teori Organisasi**

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut dalam masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian (2008:6), menyatakan :

*“ Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.”*

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Manullang (2009:59) mengemukakan:

*“ perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organin dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan . organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.”*

Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa:

*“Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu,”*

Orang-orang yang ada dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi, organisasi menghadapi perubahan yang instan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur

Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009:61), yaitu:

#### 1. Bentuk Organisasi Garis

Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.

#### 8. Bentuk Organisasi Fungsional

Organisasi fungsional adalah organisasi dimana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi

komando kepadasetiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.

## 2. Bentuk Organisasi Garis dan Staf

Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.

## 3. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional

Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

Organisasi baik itu organisasi formal maupun informal dalam melakukan segala aktifitasnya pastilah terdapat hubungan diantara orang-orang yang melaksanakan aktifitas tersebut. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin kompleks juga hubungan yang terjalin. Mengatasi masalah itu, maka dibuatlah struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antar kelompok/bagian.

### 2.1.4 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Manajemen sumber daya manusia menyangkut cara-cara mendesain sistem perencanaan, penyusunan pegawai, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai, dan hubungan ketenagakerjaan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua praktik manajemen yang dapat memengaruhi secara langsung terhadap organisasi.

Manajemen sumber daya manusia menurut Samsudin (2010:22) mengemukakan bahwa:

*“ Manajemen sumber daya manusia (human resources management) adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan.”*

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu terwujudnya tujuan organisasi.. pencapaian tujuan organisasi dan kebutuhan pegawai bukanlah dua kejadian yang terpisah atau berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu sama lainnya. Tujuan yang satu tidak dapat diraih dengan mengorbankan tujuan yang lain.

MSDM menurut Badriyah(2015:38) mengemukakan:

*“Manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan SDM yang memusatkan pada praktik dan kebijakan, serta fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi,”*

MSDM menurut Hasibuan (2007:10) mengemukakan:

*“MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.”*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sebagai sumber daya manusia utama yang memberi kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi dilaksanakan secara efektif dan efisien bagi kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat.

### 2.1.5 Teori Perilaku Organisasi

Apabila kita membicarakan perilaku manusia, berarti kita memandang organisasi itu sebagai proses, yaitu proses kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila kita membicarakan perilaku organisasi, bukan berarti organisasi itu yang berperilaku tampak secara nyata. Yang mempunyai perilaku adalah para individu, para anggota (baik secara individu maupun secara kelompok) yang ada dalam organisasi. Perilaku dari para anggota organisasi secara keseluruhan akan memberi warna, ciri dan tipe dari situasi organisasi, bagaimana organisasi itu bergerak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Wursanto : 2005, 275) Oleh karena itu mempelajari perilaku organisasi berarti mempelajari perilaku para anggota organisasi, baik secara individu maupun kelompok. Mempelajari perilaku organisasi bukan mempelajari bagaimana organisasi itu berperilaku, berarti berusaha memahami perilaku manusia. Memahami perilaku manusia adalah suatu hal yang sulit karena setiap manusia sebagai individu mempunyai perilaku berbeda-beda. Demikian pula perilaku manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor; antara lain faktor lingkungan, latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar.

1. Perilaku internal, adalah perilaku-perilaku yang dipengaruhi oleh faktor genetika, yaitu segala hal yang dibawa sejak orang itu lahir sehingga merupakan warisan dari orang tua nya.
2. Perilaku eksternal, adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya faktor lingkungan. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan ialah

segenap situasi dan kondisi yang dihadapi sehari-hari oleh seseorang dalam hidupnya. (Ibid : 2005,2

Dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi kinerja organisasi. (Syamsir Torang; 2012,112)

Oleh karna itu dalam organisasi terdapat orang-orang yang bekerja sama, maka secara otomatis organisasi tidak dapat dipisahkan dengan 'perilaku' orang-orang yang melakukan aktifitas di dalam organisasi dalam mereka mencapai tujuannya. (Ibid: 2012,112)

Perilaku organisasi ( sering disingkat sebagai OB) adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak perseorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan tentang hal-hal tersebut demi perbaikan efektivitas organisasi. (Khaerul Uman:2010,30)

Menurut Miftah Thoha(2007 : 36) mengemukakan prinsip-prinsip dasar perilaku organisasi, yaitu:

- a) Manusia berbeda perilaku
- b) Kebutuhan
- c) Membuat pilihan untuk bertindak
- d) Pengalaman
- e) Reaksi senang atau tidak senang
- f) Sikap dan perilaku seseorang

### 2.1.6 Teori Kebijakan

Di dalam kamus politik yang ditulis oleh Marbun (2007) dikatakan bahwa

*“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam suatu pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapaisasaran.”*

Sedangkan Subarsono (2005:2) menulis dalam bukunya bahwa menurut Thomas Dye (1981:1) definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melaukagn atau tidak melakukan sesuatu. Defenisi tersebut mengundang makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah dan bukan swasta; kebijakan public itu menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto,2008).

Sebagai suatu keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak dan demi kepentingan rakyat. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam Negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak (Wikipedia,2010).

Selanjutnya Rahayu (2010) mengintisarikan bahwa kebijakan terdiri dari unsur-unsur esensial, yaitu:

- 1). Tujuan (goal)
- 2). Proposal (plans)
- 3). Program
- 4). Keputusan
- 5). Efek

### **2.1.7 Konsep Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografi, desa village diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. ini tercermin dalam undang undang nomor 32 tahun 2004. Dalam otonomi desa menyatakan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.

Secara umum desa diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Paul H. Landis, seorang sarjana sosiologi pendesaan amerika serikat pada bukunya pengantar sosiologi desa dan pertanian, mengemukakan defenisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilihan berdasarkan pada tujuan analisis.

Untuk analisis statistik,desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2500 orang.untuk tujuan analisa sosial-psikologi,desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan serba informal diantara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi,desa didefenisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung kepada pertanian.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desadan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa,atau bagian desa yang bersandingan,atau pemekaran dari suatu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa,seperti halnya dengan penbentukan atau pendirian organisasi baru,pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, landasan hukum pembentukan desa adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan diaturlebih lanjut dalam PP No 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014.

UU No 6 Tahun 2014dalam pasal 8 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3)

- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
- e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber ekonomi pendukung;
- f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;
- g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan public; dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan.

- 1. wilayah desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan
- 2. penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- 3. pemerintahan, adalah suatu system pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang akan nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- 4. otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan

pemerintahannya,keseluruhan yang tersebut diatas merupakanaturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintah desa.

Otonomi daerah diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan inprovisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bias dijalankan dengan maksimal.otonomi tersebut member peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh padakearifan local yang dimiliki masyarakat terebut, karena masyarakat adalah unsure yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam UU No 6 tahun 2014:

- a kewenanga berdasarkan hak asal usul
- b kewenangan lokal berskala desa
- c kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah,pemerintah daerahprovinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan

### **2.1.8 Pemerintahan Desa**

Inu kencana syafi'I, etika pemerintah, (Jakarta : rineka cipta,1994), hal. 97 desa, lebih baiknya kita mengetahui pengertian pemerintah atau pemerintahan itu sendiri.pemerintahan adalah proses,cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang

dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks UU No 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan badan permusyawaratan (BPD) dalam menjalankan tugasnya. pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
- d. menetapkan peraturan desa

- e. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmurn masyarakat desa.

berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh karna itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat, oleh karna itu dalam melaksanakan kewenangan kepala desa diberikn sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) UU No 6 tahun 2014, yaitu: dalam melaksanakan tugas kepala desa berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
2. Mengajukan rancangandan menetapkan peraturan desa
3. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan bagian kesatu pembangunan desa pasal 78:

- 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penangulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam danlingkungan secara berkelanjutan.
- 2 Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaaan dan pengawasan.

- 3 Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan perdamaian sosial.

Berdasarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk
2. Luas wilayah
3. Bagian wilayah
4. Perangkat dan
5. Sarana dan prasarana pemerintahan

Pembangunan nasional desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintah terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan pasti bermuara pada pembangunan desa, sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa pembangunan desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya pembangunan desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam

pembangunan Desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Desa memiliki hak Otonomi tetapi terhadap dalam ikatan republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah desa. Sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak menyelenggarakan pemerintah menurut peraturan keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintah menurut peraturan pemerintah diatas. Inilah bedanya dengan desa seperti yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam peraturan perundang-undangan No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 di sebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentuk lembaga kemasyarakatan, pembentuk badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, kepala desa mempunyai wewenang :

1. Pemimpin menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
  2. Mengajukan rancangan peraturan Desa
  3. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APB untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
  5. Membina kehidupan masyarakat Desa
  6. Membina perekonomian Desa
  7. Mengkoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif
  8. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
  9. Melaksanakan wewenang Lin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala Desa mempunyai kewajiban:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
  4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
  5. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari polusi korupsi dan Negotisme (KKN)

6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa
12. Mengembangkan pendapat masyarakat dan Desa
13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala distrik 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas di sampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa kepada masyarakat dapat berupa lembaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau informasikan secara

lisan berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunikasi dan media lainnya. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat(1) PP No. 72 Tahun 2005 Yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Presiden republik Indonesia dengan persetujuan DPR menetapkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah desa sebagai pengganti dari undang-undang No.22 Tahun 1999 di sempurnakan dengan undang undang No. 23 Tahun 2014, prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan undang-undang No. 23 Tahun 2014 adalah:

- a. Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka peraturan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa sejauh mungkin diseragamkan.
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa hanya mengatur desa dan kelurahan dari segi pemerintahannya dengan demikian undang-undang tersebut mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum

adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang kelangsungan pemerintahan.

Program tahunan dalam rencana kerja yang disusun oleh pemerintah desa terhadap kegiatan-kegiatan yang kebijaksanaan dan sistem penyelenggaraan pemerintah desa yang selama ini diatur dengan berbagai kebiasaan daerah menjadi sistem penyelenggaraan pemerintah desa secara nasional dengan pola yang seragam ini berarti bahwa penyelenggara desa berdasarkan undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 adalah merupakan pembaharuan dalam sistem penyelenggara pemerintah Desa. Hal ini sejalan dengan peranan dan fungsi Desa dalam kehidupan sebagai berikut:

- a. Sumber segala data, informasi, data gerak, pembinaan dan pengawasan.
- b. Benteng yang harus diandalkan dalam pengalaman Pancasila.
- c. Pusat penumbuhan dan peningkatan jiwa gotong-royong di segala bidang kehidupan dan penghidupan.
- d. Pusat pembinaan partisipasi masyarakat di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Memperhatikan pentingnya peranan dan fungsi aparat pemerintah desa yang merupakan barisan terdepan dalam mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat maka lembaga masyarakat desa sebagai lembaga pemerintah desa yang merupakan terwujudnya demokrasi Pancasila di tingkat desa mempunyai peranan yang menentukan di dalam keberhasilan seseorang kepala desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

#### Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Ekonomi masyarakat

- 1 Pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dan juga bisa diperoleh untuk masyarakat
- 2 Memperbaiki akses jalan menuju lokasi perkebunan masyarakat. Infrastruktur bertujuan untuk memperlancar arus distribusi, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi, dan meningkatkan pendapatan usaha ekonomi.
- 3 Pemerintahan Desa menerapkan dana simpan pinjam dan memberikan pinjaman kepada masyarakat
- 4 Mengerakan masyarakat untuk bekerja sama dalam membangun dan mendukung pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi masyarakat
- 5 Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia serta kinerja pemerintah desa
- 6 Tingkat pendidikan di Desa Pulau Baru yang berbeda ada beberapa individual yang memiliki akses yang besar terhadap pendidikan,

Peoses pembuatan PAMSIMAS Desa Pulau Baru, dan pelayanan masyarakat, misalnya pergantian pompa, penyaluran pipa kepada masyarakat-masyarakat, pergantian atau perluasan jaringan pipa

#### Upaya pemerintah dalam bidang sosial

- 1 Pemberdayaan masyarakat yaitu Pemerintah Desa mengasih bantuan kepada masyarakat seperti bibit yang diberikan kepada masing-masing masyarakat.

- 2 Meningkatkan ekonomi masyarakat seperti transportasi yang dikelola oleh bumDES dalam meningkatkan PAD masyarakat.
- 3 Didalam bidang sosial juga ada bantuan untuk masyarakat seperti anak yatim, orang tua kurang mampu seperti orang tua renta, dan orang tua terlantar. Dan bantuan seperti bansos, dan ada juga bantuan dari polri, serta bantuan BLT-DD.
- 4 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia. untuk memperkuat peluang ekonomi mereka.
- 5 untuk wirausaha UMKM akan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan memaksimalkan keuntungan ekonomi. bagi masyarakat
- 6 program Indonesia Pintar merupakan program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun informal bagi keluarga miskin
- 7 Mengembangkan sistem bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat.
- 8 Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan, dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan masyarakat.
- 9 Membangun apresiasi terhadap lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabat masyarakat desa
- 10 Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir, miskin dan anak-anak terlantar

### 2.1.9 Konsep Peningkatan Sosial Ekonomi

Meningkatkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas yang lebih maju dan jika secara umum pengembangan berarti pola pertumbuhan, perubahan secara perlahan dan perubahan secara bertahap. Padahal kekatnya pengembangan upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar. Oleh karena itu pengembangan masyarakat bergantung pada interaksi antara manusia dan aksi bersama dari pada kegiatan individu.

Segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan yang di munculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian, sosial haruslah mencakup lebih dari seorang individu yang terkait pada kesatuan interaksi, sosial ekonomi dapat dikatakan pengelompokan kedudukan orang serta posisi dan dapat dilihat dari jenis aktivitas ekonomi

## 2.2 Pengembangan Ekonomi

Pengembangan ekonomi adalah suatu usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan *life skill* (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat.

Pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Setiap upaya pengembangan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi.

Dalam pengembangan ekonomi ada beberapa faktor pendukung yaitu sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan budaya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bertujuan ke arah yang lebih baik, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat berkembang.

### **2.3 Faktor faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Sosial Ekonomi**

Dalam upaya pengembangan sosial ekonomi pada masyarakat pada umumnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan tersebut ini dapat tercermin dalam keadaan status sosial ekonomi masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Sosial ekonomi sebagai pengembangan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan, ekonomi, status sosial ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan tertentu.

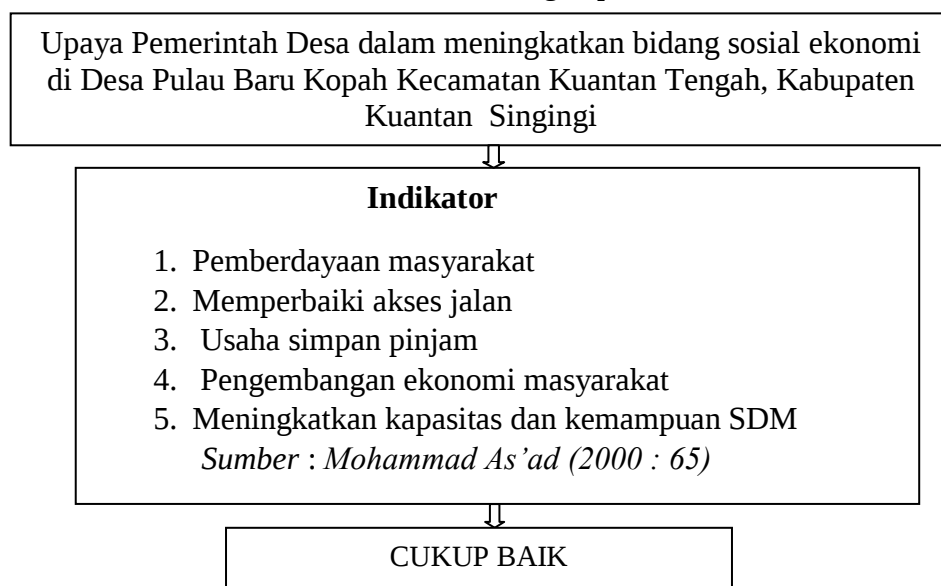
Pekerjaan yang bervariasi prestasinya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar.

1. Tingkat pendidikan yang berbeda ada beberapa individual memiliki akses yang besar terhadap pendidikan
2. Sumber daya ekonomi yang berbeda
3. Tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat, perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam masyarakat

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidefenisikan sebagai masalah yang penting.

Gambar.2.4 Kerangka pemikiran



## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian diatas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Upaya Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Bidang Sosial Ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah.

## 2.6 Defenisi Konseptual

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa diberikan kesempatan yang besar untu mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa.

Desa menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja dalam bukunya “ Otonomi desa” menyatakan bahwa: “ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

## 2.7 Defenisi Operasional

konsep Operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur, dan juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan baha, maka serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan menganalisa data. Konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

Adapun variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu : Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi, dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Memperbaiki akses jalan
3. Usaha simpan pinjam
4. Pengembangan ekonomi masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator dan Sub indikator dari konsep operasional dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel : 2.7. Konsep Operasional

| <b>Variabel</b>                                                                                                                              | <b>Indikator</b>        | <b>Sub Indikator</b>                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi | Pemberdayaan masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan</li> <li>- perencanaan</li> <li>- Sosialisasi</li> </ul>                                       |
|                                                                                                                                              | Memperbaiki akses jalan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrol sosial masyarakat</li> <li>- Keterlibatan masyarakat</li> <li>- Pengawasan yang dilakukan oleh BPD</li> </ul> |
|                                                                                                                                              | Usaha simpan pinjam     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspek keuangan</li> <li>- Menetapkan anggaran bersama BPD</li> <li>- Merumuskan anggaran dana desa</li> </ul>         |

|  |                                 |                                                                                                                                                |
|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pengembangan ekonomi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Desa</li> <li>- Kontrol sosial masyarakat</li> <li>- Potensi yang dikembangkan</li> </ul> |
|  | Meningkatkan kapasitas SDM      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai perencanaan</li> <li>- Sesuai peraturan Desa</li> <li>- Kinerja masyarakat</li> </ul>          |

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Di dalam metode penelitian kualitatif proses risetnya berawal dari suatu observasi atau gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah (*exploratory*) dimana pengetahuan tentang permasalahan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali, riset kualitatif bertujuan untuk memperjelas fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalamnya. Riset ini tidak memerlukan besarnya populasi atau sampel. Disini lebih ditekankan persoalan kedalam (kualitas) dan bukan banyaknya (kuantitas) data.

Ciri lain metode deskriptif ialah titik berat pada observasi dan suasana alamiah, peneliti bertindak sebagai pengamat. jenis penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi

#### **3.2 Informan Penelitian**

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti memilih *key informan* dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai *key informan* yang paling mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun yang peneliti jadikan sebagai *key informan* adalah *subjad* ataupun individu serta lembaga yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, cirri-cirinya adalah:

- a. Berada di daerah yang diteliti
- b. Mengetahui kejadian /permasalahan
- c. Bias berargumentasi dengan baik
- d. Terlibat langsung dengan permasalahan

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 : ( Jurnal Informan penelitian upaya pemerintah desa dalam Meningkatkan bidang sosial ekonomi di Kantor Kepala Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singing)

| No            | Informan penelitian | Jumlah |
|---------------|---------------------|--------|
| 1             | Kepala Desa         | 1      |
| 2             | Sekretaris Desa     | 1      |
| 3             | Kaur Umum           | 1      |
| 4             | Kasi Keuangan       | 1      |
| 5             | Kasi Pemerintahan   | 1      |
| 6             | Kasi kesejahteraan  | 1      |
| 7             | BPD                 | 1      |
| 8             | Masyarakat          | 5      |
| <b>Jumlah</b> |                     | 12     |

Sumber : Data Olahan 2021

Informan adalah orang-orang yang benar-benar paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara teknik *purposive sampling* dan *sampling snowball*.

Purposive sampling yaitu teknik penarikan informan secara subjektif dengan maksud dan tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang dipetlukan bagi peneliti yang akan dilakukan yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi keuangan, Kasi Pemerintahan, kasi kesejahteraan dan dari BPD. Untuk masyarakat, peneliti menggunakan teknik *sampling snowball*, yaitu masyarakat yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti saat penelitian guna untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian kita sampai data yang kita butuhkan benar-benar valid.

### **3.3 Sumber Data Penelitian**

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari keterangan yang diberikan oleh responden dilapangan. Responden merujuk kepada individu atau seseorang yang dapat memberikan informasi dasar mengenai masalah yang akan diteliti yaitu hasil dari wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas permasalahan yang diteliti, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait dalam penelitian ini.

### **3.4 Fokus Penelitian**

Penulis melakukan fokus penelitian terhadap upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di Kantor Kepala Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.5 Lokasi Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini di Kantor Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten kuantan Singingi. Peneliti memilih lokasi ini, karena peneliti ingin mengetahui apakah upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah sudah terlaksana dengan baik atau belum.

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Observasi**

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk meghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. (Sugiyono: 2010: 166). Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

#### **3.6.2 Wawancara**

Wawancara yaitu proses keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana wawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.( Sugiyono,2010:157)

### 3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan sebagai alat bukti dalam mencari informasi yang bersumber dari instansi terkait yang dapat memperkuat hasil penelitian.

### 3.6.4 Triangulasi

Menurut Meolong (2005 : 330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi paling banyak digunakan ialah melalui sumber data, seperti pengumpulan data, dan wawancara

## 3.7 Metode Analisa Data

Analisis merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang ada. Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa Kuaalitatif Deskriptif data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:60). Berikut ini ada beberapa tahapan yang dipakai untuk menganalisis data:

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang sudah direkduksi dapat memberikan gambaran yang tepat, dan dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan difokuskan pada upaya pemerintah desa dalam

meningkatkan bidang sosial ekonomi di Kantor Kepala Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian Kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat dilapangan disajikan dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya dilapangan. berdasarkan peneltian yang telah dilakukan, peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait upaya pemerintahdesa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di Kantor Kepala Desa Pulau Baru Kopah. Semua data mengacu pada informasi atau data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan.

c. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berkenaan dengan Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, serta mengaitkan dengan teori-teori e-government maka ditarik kesimpulan yang bersifat sempurna. Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian

### 3.8 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian tentang Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan Bidang sosial Ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 : Jadwal penelitian Upaya Pemerintah Desa dalam meningkatkan idang Sosial Ekonomi

[illegible]

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1. Sejarah Desa**

Pada zaman dahulunya desa yang dimaksud disini belum ada, dan pada saat ini memang tidak ada sejarah yang menceritakan secara detil tentang berdirinya desa pulau baru. Akan tetapi berdasarkan dari cerita ceritanya yang dihimpun pada dahulunya dikenegrian kopah terddapat satu kesatuan yang disebut dengan Koto Tuo Kopah, yaitu Desa yang tertua di kenegerin Kopah. Pada dahulunya kenegerian Kopah hanya terdiri dari satu Desa. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang semakin ramai dikenegerian Kopah, maka penduduk berpencah membuka lahan yang baru yang pada saat itu masih hutan sehingga penduduk tadi membentuk perkumpulan dan berdirinya Desa-desa diantaranya Desa Pulau Baru Kopah, Desa Koto Tuo, Desa Kopah, Desa munsalo, desa jaya dan terakhir Desa Titian Modanh Kopah. Yang mana saat ini jumlah Desa dikenegrian Kopah sudah mencapai 6 Desa karena adanya pemekaran sesuai dengan perkembangan zaman.

Dan khusus untuk desa pulau baru pembukaan lahannya sekitar tahun 1912, M yang di prakasai oleh beberapa orang dan pada saat pembukaan-pembukaan lahan tersebut mereka menjumpai batang pohon baru yang sangat besar yang berasa di sebuah pulau pada saat itu mereka ingin menamakan daerah yang mereka buka dengan nama sebutan Pulau Baru, dulu Pulau Baru belum mempunyai pimpinan akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman penduduk bertambah maka, mereka mulai melakukan penunjukan ketua rombongan dengan tujuan untuk merundingkan apabila terjadi sesuatu hal diwilayah pulau baru,

seperti menentukan batas-batas wilayah maka ketua rombongan yang berunding dengan ketua rombongan wilayah lain untuk menentukan batas-batas wilayah, seperti dengan batas wilayah Koto Tuo dan wilayah lainnya. Dengan adanya perundingan ketua rombongan maka disepakatilah wilayah masing-masing.

Setelah kemerdekaan diraih oleh Indonesia dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kecamatan dibentuk dengan seiring dengan perkembangan zaman semakin kuat dan banyak penduduk maka disahkanlah Pulau Baru sebagai Desa dan diberi nama Desa Pulau Baru, dan bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sampai saat ini telah terjadi beberapa kali pergantian Kepala Desa antara lain:

Tabel 4.1 Daftar Nama yang Pernah Menjabat Kepala di Kantor Kepala Desa Pulau Baru KopahKecamatan Kuantan Tengah :

| No. | NAMA PEJABAT   | PERIODE        | KET |
|-----|----------------|----------------|-----|
| 1   | Dula Harun     | 1974-1984      |     |
| 2   | Amir Basri     | 1984-1987      |     |
| 3   | Siburasi       | 1987-1993      |     |
| 4   | H. Nubasari    | 1993-2001      |     |
| 5   | Muslim         | 2001-2007      |     |
| 6   | H. Juni        | 2007-2013      |     |
| 7   | H. Musa Hasril | 2013-2019      |     |
| 8   | Mahyudin       | 2019- Sekarang |     |

#### 4.2 Luas dan Batas Wilayah

Desa Pulau Baru Kopah terletak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 11 Kilometer (KM), terbagi dalam 3 Dusun yaitu, Dusun Tanjung Baru, Dusun Tanah Teban, Dusun Kampung Tengah, Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa beradadi Dusu Tanjung Baru dan Dusun Tanah Teban, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun (Kadus).

Di tinjau dari letak geografisnya Desa Pulau Baru Kopah mempunyai batas wilayah yaitu:

1. Sebelah Utara Kec. Sentajo Raya dan Desa Koto Tuo Kec. Kuantan Tengah
2. Sebelah Selatan PT. Duta Palma Nusantara
3. Sebelah Barat Desa Seberang Taluk hilir
4. Sebelah TimurDesa Titian Modang Kopah

Sedangkan jarak dari kabupaten dan kecamatan adalah:

1. Jarak ke ibu kota Kecamatan 5 KM
2. Jarak ke ibu kota kabupaten 6 KM

#### 4.3 Penduduk

Masyarakat Pulau Baru Kopah merupakan masyarakat yang heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain, suku melayu dan jawa, minang, dan banyak lagi lainnya.Masyarakat Pulau Baru Kopah mayoritas adalah melayu dan jawa dimana yang dahulunya daerah ini dibuka pertama kali oleh orang melayu.

Berdasarkan data statistik pada rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Baru Kopah tahun 2015-2021, jumlah penduduk Pulau Baru Kopah berjumlah 276 KK dan keseluruhan 424 orang, terdiri dari laki-laki berjumlah 211 orang dan perempuan 213 orang dari 276 kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Penduduk di Desa Pulau Baru Kopah menurut jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase(%) |
|----|---------------|--------|---------------|
| 1  | Laki-laki     | 211    | 49,8 %        |
| 2  | Perempuan     | 213    | 50,2 %        |
|    | <b>Jumlah</b> | 424    | 100%          |

Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa)  
Pulau Baru Kopah Tahun 2015-2021

#### 4.4 Perekonomian

Melihat dari segi sosial ekonomi masyarakat Pulau Baru Kopah umumnya secara kasat mata mempunyai mata pencaharian yang bermacam macam yang sebagian besar yaitu mempunyai mata pencarian sebagai petani karet dan kelapa sawit, pedagang, buruh tani, itu di sektor non formal ini disebabkan pertahanan yang ada di Pulau Baru Kopah mengizinkan untuk bertani karet dan sawit. Sedangkan sektor formal seperti PNS, Pemda, Honorer, Guru dan Tenaga Medis.

#### 4.5 Pemerintahan

Pulau Baru Kopah adalah salah satu Desa yang berpedoman pada UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (pasal 26 ayat 1 UU No 06 Tahun 2014).dan

selanjutnya dibentuk pula dusun-dusun yang dipimpin oleh kepala dusun, RW (rukun warga), dan dibawah RW ada RT (rukun tetangga), berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun jumlah aparat pemerintahan Pulau Baru Kopah dapat dilihat dari tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2: Jumlah Aparat Pemerintah di Desa Pulau Baru Kopah

| No            | Aparat Pemerintah        | Jumlah          |
|---------------|--------------------------|-----------------|
| 1             | Kepala Desa              | 1 orang         |
| 2             | Sekretaris Desa (Sekdes) | 1 orang         |
| 3             | Operator Desa            | 1 orang         |
| 4             | Kepala Dusun             | 3 orang         |
| 5             | Rukun Warga (RW)         | 3 orang         |
| 6             | Rukun Tetangga (RT)      | 6 orang         |
| <b>Jumlah</b> |                          | <b>15 orang</b> |

Sumber Data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Baru Kopah 2015-2021

#### 4.6. Pendidikan

Pendidikan adalah sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental), membuka sekolah umum di Pulau Baru Kopah walaupun belum terealisasi namun telah dalam tahap rencana yang telah disusun dalam RPJM Desa Pulau Baru Kopah. Dalam hal pemerintahan juga tidak pernah berhenti untuk membangun dan membuat sarana dan prasarana untuk mendidik agar Pulau Baru Kopah tidak tertinggal dengan Desa-desanya lain.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3: jumlah sarana pendidikan di Desa Pulau Baru Kopah

| No            | Sarana Pendidikan         | Jumlah |
|---------------|---------------------------|--------|
| 1             | TK/ PAUD                  | 1 Buah |
| 2             | Sekolah Dasar Negeri      | 1 Buah |
| 3             | Madrasah Diniyah Awaliyah | -      |
| 4             | SMP                       | -      |
|               | SMA                       |        |
| <b>Jumlah</b> |                           | 2 Buah |

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  
Pulau Baru Kopah Tahun 2015-2021

Dari tabel di atas, maka sarana pendidikan di Pulau Baru Kopah cukup memadai, untuk meningkatkan kecerdasan anak didik.

#### 4.7 Kesehatan

Dalam melayani masyarakat dibidang kesehatan, pemerintah telah mendirikan satu buah puskesmas yang buka setiap hari senin sampai hari jumat bagi msyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Bila dilihat dari intensits pelayanan kesehatan bagi masyatrakat Pulau Baru Kopah yang membuka Puskesmas dari hari senin sampai hari jumat, masih dirasakan kurang oleh masyarakat akibat kurangnya alat medis yang tersedia. Akan tetapi karena Pulau Baru Kopah dekat dengan beberapa desa di sekitarnya maka masyarakat Pulau Baru Koah biasanya dating berobat ketempat praktek Dokter di Desa tetangga dan bila sakitnya kronis langsung dibawah kerumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi bertempat di kota taluk kuantan

#### 4.8. Agama

Terutama sekali dalam kehidupan berbangsa yang paling penting adalah agama, agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat Pulau Baru Kopah mayoritas beragama islam. Dan ada sedikit penduduk yang menganut agama Kristen Protestan ini hanya masyarakat transmigrasi dari daerah lain yang membuat kebun dan bertempat tinggal di Desa Pulau Baru Kopah. Dari tabel berikut dapat dilihat jumlah penduduk Pulau Baru Kopah menurut agama dibawah ini.

Tabel 4.4: Jumlah Rumah Ibadah di Desa Pulau Baru Kopah

| No            | Klarifikasi Agama | Jumlah | Persentase(%) |
|---------------|-------------------|--------|---------------|
| 1             | Islam             | 423    | 100 %         |
| 2             | Kristen Protestan | -      | 0 %           |
| <b>Jumlah</b> |                   | 423    | 100 %         |

Sumber data: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)  
Pulau Baru Kopa Tahun 2015-2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat Pulau Baru Kopah mayoritas adalah pemeluk agama islam dengan jumlah 423 orang ( 100 %) sedangkan yang memeluk agama kristen protestan berjumlah 0 oraang dengan persentase (0 %).

Ketaatan masyarakat dalam menjalankan ibadah, di dukung dengan adanya sarana penunjang masyarakat dalam menjalankan agamanya. Sarana rumah ibadah di Pulau Baru Kopah hanya terdapat bagi masyarakat yang beragama islam. Banyaknya sarana ibadah bagi masyarakat yang beragama islam dan Kristen Protestan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 : Jumlah Rumah Ibadah di Desa Pulau Baru Kopah

| <b>No</b>     | <b>Sarana Ibadah</b> | <b>Jumlah</b> |
|---------------|----------------------|---------------|
| 1             | Mesjid               | 1 Buah        |
| 2             | Musholla             | 2 Buah        |
| 3             | Gereja               | -             |
| <b>Jumlah</b> |                      | 3 Buah        |

Sumber Data : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pulau Baru Kopah Tahun 2015-2021

Maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Pulau Baru Kopah cukup sarana untuk melaksanakan ibadah. Keberadaan sarana ibadah ( mesjid dan musholla) ini selain digunakan sebagai tempat beribada, juga difungsikan sebagai tempat pendidikan anak-anak dalam bidang seni baca Al -Qur'an, tempat pelaksanaan wirid dan tempat pengajian bagi remaja dan orang tua.

## BAB V

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 6.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 12 orang dalam kaitannya dengan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Data-data yang penulis peroleh dan data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan meningkatkan sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut dideskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia dan tingkat pendidikan.

##### 6.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dan hasil wawancara responden di dapat jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis kelamin

| No     | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase% |
|--------|---------------|----------------|-------------|
| 1      | Laki-laki     | 11             | 91.6%       |
| 2      | Perempuan     |                | -           |
| Jumlah |               | 12             | 100%        |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat jumlah informan yang digunakan sebanyak 12 orang, keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki.

### 6.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Usia

Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2 Klarifikasi Informan Menurut Tingkat Usia

| No            | Tingkat Usia ( Tahun) | Jumlah Responden (Orang) | Persentase (%) |
|---------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 1             | <30                   | 3                        | 25 %           |
| 2             | 31-40                 | 6                        | 50 %           |
| 3             | 41-50                 | 3                        | 25 %           |
| 4             | >51                   | 0                        | -              |
| <b>Jumlah</b> |                       | 12                       | 100%           |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Dari tabel 5.2 dapat dilihat bahwa jumlah informan yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 3 orang ( 25%), antara umur 31-40 sebanyak 6 orang ( 50%) antara umur 41-50 sebanyak 3 orang ( 25%) dan tidak ada informan yang berumur dari 50 tahun

### 6.1.3 Identitas informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini

Tabel 5.3 : Klarifikasi Informan Menurut tingkat Pendidikan

| No            | Pendidikan | Jumlah responden<br>(orang) | Persentase(%) |
|---------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 1             | SLTA       | 5                           | 41,7 %        |
| 2             | Diploma    | -                           | 0 %           |
| 3             | Strata I   | 7                           | 58,3 %        |
| 4             | Strata II  | -                           | 0%            |
| <b>Jumlah</b> |            | 12                          | 100%          |

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa informan yang memiliki tingkat pendidikan SLTA ada sebanyak 5 orang (41,7%) dan informan yang memiliki tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 7 orang (58,3%)

## 6.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Upaya pemerintah Desa dalam Meningkatkan Bidang Sosial Ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Upaya pemerintah desa dalam meningkatkan bidang sosial ekonomi merupakan konsep pemberdayaan mulai menjadi pendahuluan yang sudah diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat pekerja yang dikuasai. Di Negara-negara yang sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi

sumber daya alam dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Dalam skala yang lebih luas, peningkatan status sosial dalam masyarakat karena, berperan serta dalam masyarakat, pengaruh tidak langsung termasuk kesempatan mendapatkan akses yang lebih bagus terhadap fasilitas-fasilitas umum. Paradigma pemberdayaan lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah kemiskinan lebih lanjut.

perekonomian di Desa Pulau Baru Kopah semakin produktif, mengurangi kemiskinan serta ketimpangan antar desa. Adapun jumlah Realisasi pelaksanaan APBDes yang diberikan kepada Desa berdasarkan pada letak geografis, jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan Desa.

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi oleh pemerintah Desa di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan tengah Kabupaten Kuantan Singingi ini didasari oleh dimensi dari beberapa indikator.

Pada bagian ini pembahasan mengenai upaya pemerintah desa dalam meningkatkan sosial ekonomi dalam beberapa indikator.

1. Pemberdayaan masyarakat
2. Memperbaiki akses jalan
3. Usaha simpan pinjam
4. Pengembangan ekonomi masyarakat
5. Meningkatkan kapasitas SDM

Berdasarkan hasil pembahasan pada dimensi pengembangan sumber daya manusia untuk indikator pemerintah Desa memfasilitasi dalam bentuk pelatihan

bagi para pelaku usaha dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini ditandai oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan kepada para pelaku usaha.

Selanjutnya indikator mengenai pemerintah Desa menyarankan kepada pelaku usaha untuk melakukan perbandingan ke luar desa masih belum dilaksanakan dengan optimal, hal ini ditandai dengan keterbatasan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk melakukan perbandingan keluar desa.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi oleh pemerintah desa Pulau Baru Kopah yaitu keterbatasan anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa itu sendiri sehingga kesulitan dalam memberikan pengetahuan mengenai sistem perekonomiannya yang baik, kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri

Realisasi pelaksanaan anggaran APBDes kepada pemerintah desa, besar harapan pemerintah pusat agar aparat desa dapat memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa melakukan penyelewengan dana. Terkait dengan hal tersebut, berikut pendapatan yang diterima oleh desa Pulau Baru Kopah pada tahun 2020 antara lain. Pendapatan asli Desa sebesar Rp. 0, Dana Desa sebesar Rp. 783.439.000,00, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 370.851.000,00, Dana bagi hasil Rp. 14.963.000,00, jadi jumlah keuangan desa yang diterima oleh desa Pulau Baru Kopah sebesar Rp 1.169.253.000,00 dan diaplikasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### **6.2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktifitas sosial agar mereka bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri.

Secara dokumentatif pemberdayaan masyarakat desa tertuang dalam pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) dan rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut dengan rencana kerja pembangunan desa ((RKPDDes) dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

Dari hasil penelitian di lapangan, pada tahap pemberdayaan masyarakat desa didahului dengan sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Hal ini sesuai apa yang diungkapkan oleh

Bapak Mahyudin selaku kepala Desa Pulau Baru Kopah :

*“Secara umum masyarakat pulau baru kopah cukup mengetahui tentang maksud dan tujuan program tersebut sosialisasi tentang program pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Baru kopah cukup baik, dalam sosialisasi yang dilakukan adalah masyarakat untuk pembuatan baliho, informasi melalui komunikasi, dan pembuatan informasi kadang ditempat keramaian, masyarakat dan dilaksanakan melalui rapat desa antar pemerintah”*(Mahyudin, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 juni 2021\_10.00 WIB)

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial. Menyatakan keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling

membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar.

Menurut pengamatan penulis bahwasannya kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan desa dengan baik, saat musyawarah kepala desa turut mengundang kelembagaan desa seperti RT/RW, Kadus, BPD dan sebagainya yang selanjutnya dipilih dan ditetapkan bersama sebagai rencana skala prioritas dan selanjutnya dimasukkan dalam RPJM Desa. Sebagai pernyataan dari Bapak Pebri Mayoka selaku sekretaris Desa Pulau Baru Kopah :

*“Pemerintah dan masyarakat desa Pulau Baru Kopah dapat menetapkan sasaran pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa sesuai dengan RPJMDes atau usulan dari kelembagaan masyarakat desa yang disepakati oleh musyawarah Desa”.* (Pebri Mayoka, Pulau Baru Kopah, wawancara langsung, 29 juli 2021\_10.00 WIB)

Pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan Desa mencakup semua sumber daya yang ada di pemerintah desa seperti kepala Desa, perangkat Desa dan BPD. Bentuk dari pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, musyawarah dalam penyusunan program-program desa, koordinasi dalam pelaksanaan program-program desa, dan peningkatan kualitas kinerja di pemerintahan desa. Dengan adanya program pemberdayaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja di pemerintahan desa dalam membangun serta memajukan desa.

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang meningkatkan kemampuan dan melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi keentingan dan

kebutuhan. Namun dalam hal ini, pemerintah desa kurang mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh bapak Mahdudin selaku anggota BPD Pulau Baru Kopah:

*“Pemerintah Desa Pulau Baru Kopah tidak mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dalam pemberdayaan masyarakat, dan respon pemerintah desa cukup baik, menerima, namun ada beberapa masyarakat yang masih bertahan juga bisa meningkatkan kemampuan masyarakat”. (Mahdudin, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 juli 2021\_10.00 WIB)*

Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama itu diduga kuat dan optimal memberdayakan masyarakat, dan karena itu tidak layak disebut program pemberdayaan masyarakat. Dinamika kelompok masyarakat dan kualitas pendamping untuk menentukan tingkat keberdayaan masyarakat.

Hasil dari pengamatan, pemerintah Desa Pulau Baru Kopah memberikan pemberitahuan ketika ada keterlibatan antar Desa untuk pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat sudah baik. Dalam hal pemberitahuan kepada masyarakat, pemerintah desa Pulau Baru Kopah.

*“Pemerintah Desa Paulau Baru Kopah sejauh ini belum ada kerjasama dengan pihak ketiga dan masih menggunakan Swa kelola, pemberdayaan masyarakat belum melibatkan pihak ketiga dalam melaksanakan pemberdayaan’. Pebri Mayoka, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 juli 2021\_10.00 WIB)*

Kerja sama desa sebagai dimaksud dalam undang-undang desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kerja sama desa bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dalam mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam rangkaian yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Dalam kerja sama desa, masing-masing pihak dapat member dan mendapatkan keuntungan dari pihak lain, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Kerja sama desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Dalam meningkatkan kemampuan memberdayakan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan

### **6.2.2 Memperbaiki Akses Jalan di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-citadan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia harus meningkatkan dan merubah tujuan tersebut ke arah yang lebih baik, melalui pelaksanaan program-program pembangunan jalan di Desa Pulau Baru Kopah yang merupakan jaringan

transportasi yang paling dominan digunakan oleh masyarakat Pulau Baru Kopah untuk beraktifitas.

Menurut pengamatan penulis bahwasannya pelaksanaan akses jalan sesuai dengan pengawasan dan dimusyawahkan terlebih dahulu dan tujuan dari kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan Visi

Misi Desa Pulau Baru Kopah serta harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam kegiatan tersebut. Hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Baru Kopah bahwa :

*“Seluruh kegiatan meningkatkan sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah telah sesuai dengan peraturan Desa, dimana seluruh kegiatan yang akan dilakukan dilingkungan desa harus dimusyawahkan terlebih dahulu dan tujuan dari kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan Visi misi Desa Pulau Baru Kopah serta harus melibatkan semua komponen masyarakat dalam kegiatan tersebut.”* ( Hardianto, Pulau Baru Kopah , wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Infrastruktur jalan salah satu prioritas yang kita benahi dan perbaiki, karena jalan merupakan salah satu akses penting dalam hal kemajuan suatu wilayah dan perekonomian masyarakat. Infrastruktur jalan setiap tahunnya dialokasikan untuk perbaikan jalan untuk masyarakat Desa Pulau Baru Kopah.

Memperbaiki akses jalan membutuhkan waktu, pemerintah desa Pulau Baru Kopah juga memikirkan kualitas jalan poros desa semakin berkualitas dapat memacu lajunya perekonomian masyarakat desa Pulau Baru Kopah, dan jalan desa Pulau Baru Kopah sudah dalam kondisi baik. Prasarana dasar seperti jalan itu penting dalam mendukung laju perekonomian masyarakat.

Menurut pengamatan penulis bahwasannya pelaksanaan meningkatkan sosial ekonomi sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati saat musyawarah desa sudah telaksana dengan baik. Dapat dilihat dari pelaksanaan dari hasil

Musrembang yang terlaksana di Desa Pulau Baru Kopah dengan baik. Dari segi pembangunan fisik berupa pembangunan seluruh drainase, pembangunan jalan Desa, semenisasi jalandesa dan dari segi non fisik berupa penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan PKK serta intensif guru TPA. hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pebri mayoka S.Pi selaku Sekretaris Desa Pulau Baru Kopah sebagai berikut:

*“Pelaksanaan dari hasi musrembangdes yang terlaksana dari segi pembangunan fisik berupa pembangunan seluruh drainase, pembangunan jalan desa. Semenisasi jalan Desa dan dari segi non fisik berupa penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ, pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan PKK. Semua telah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati saat musyawara desa berlangsung dan melibatkan RT/RW, Kadus, BPD, serta perwakilan masyarakat.”* (Pebri Mayoka S.Pi, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_ 10.00 WIB)

Kemudian dari pelaksanaan pembangunan memperbaiki jalan masyarakat pemerintah selalu melakukan pengawasan , dan dilaksanakan secara Swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku local, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Bapak Mahyudin selaku Kepala Desa Pulau Baru Kopah :

*“Pemerintah Desa Pulau Baru Kopah selalu mengawasi dan melaporkan. Pemerintah desa serta BPD berkoordinasi dalam pelaksanaan dalam pengawasan pembangunan oleh pemerintah Desa.”* (Mahyudin, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Dalam hal pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan jalan, pemerintah desa telah mempublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk tulisan yaitu bentuk baliho di setiap titik pembangunan fisik serta pamphlet atau papan

pengu,uman di kantor Desa Pulau Baru Kopah serta disampaikan di forum musyawara desa. Berikut wawancara dengan Bapak Hardianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Baru Kopah :

*“Masyarakat desa sudah bertanggung jawab dengan baik. Secara administratif BPD telah melaporkan kepada pemerintah desa dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban.dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan lancar, proses perubahan menuju perbaikan yang dilakukan pemerintah desa.”* (Bustamil Arifin, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_ 10.00 WIB)

Akses jalan adalah prasarana transrtasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah. Setiap jalan yang acap kita lewati sejatihnnya dibagi kedalam beberapa klarifikasi atau ada yangmenyebutnya dengan istila hirarki jalan. Defenisinya adalah pengelompokan jalan denganbeberapa dasar, antara lain berdasarkan administrasi pemerintahan atau berdasarkan pungsi jalan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena kedua hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Insfrastruktur yang memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing potensi secara maksimal.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa semua pelaksanaan meningkatkan sosial ekonomi Desa Pulau Baru Kopahsudah terlaksana dengan baik,lancar dan aman. Dan masyarakat menilai pemerintah Desa Pulau Baru Kopah sudan transparan dan bertanggung jawabdalam meningkatkan pembangunan.

### **6.2.3 Menetapkan Usaha Dana Simpan Pinjam di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi adalah mirip dengan kegiatan bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga dengan demikian KSP juga dapat dipertimbangkan sebagai lembaga intermediasi, yang berfungsi menghimpun dana atau yang membutuhkan. Namun demikian, KSP tidak boleh meninggalkan jati dirinya sebagai koperasi yang memiliki prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan masyarakat yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung sukarela dan atas dasar persamaan hak, kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Koperasi ingin membangunkesejahteraan anggota koperasi ataupun masyarakat pada umumnya dan meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang lemah.

Menurut pengamatan penulis pemerintah Desa Pulau Baru Kopah menetapkan anggaran dana Desa terhadap pelaksanaan meningkatkan ekonomi masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hardianto selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Baru Kopah mengatakan ;

*“menurut Kasih Pemerintah Desa Pulau baru kopah pada saat sekarang ini belum ada menetapkan dana simpan pinjam dan hanya ada usaha simpan pinjam perempuan/koperasi.”* (Hardianto, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Program usaha ekonomi desa yang dikembangkan adalah Usaha Ekonomi desa simpan pinjam ( UED-SP) yang merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, dengansasaran utamanya adalah masyarakat miskin. Program pengembangan UED-SP bertujuan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa. Dalam upaya untuk mendapatkan modal usaha dengan persyaratan mudah.

Menurut pengamatan penulis, pengetahuan masyarakat melaksanakan dengan anggaran desa. Dan secara umum masyarakat meyakini bahwa kehadiran aparat desa dalam setiap pelaksanaan merumuskan anggaran dana desa, pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa Pulau Baru Kopah. Hasil wawancara kepada Ibu Herwanis selaku Kasi Kesejahteraan Desa Pulsu Baru Kopah mengatakan :

*“Menurut Kasi Kesejahteraan, mengawasi dan memintah keterangan kepada tentang penyelenggaraan pemerintahh desa, pemerintah desa kepada pemerintah desa. Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.”* (Erwanis, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Badan permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hal meningkatkan bidang sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah, BPD ikut dalam pengawasan peningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam hal

pemantauan yang dilakukan oleh pihak BPD, dari pengamatan yang penulis lakukan, dalam 1 bulan BPD datang 2 kali secara berkala mengecek ke lokasi tempat pelaksanaan peningkatan ekonomi Desa diselenggarakan dan selalu memantau tentang anggaran yang dirumuskan BPD telah digunakan kepala pemerintah desa apakah sesuai dengan perencanaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mahdudin selaku anggota BPD Desa Pulsu Baru Kopah menerangkan :

*“Apatur pemerintahan desa dan BPD belum ada menetapkan anggaran yang dirumuskan desa dan hanya ada pemberdayaan koperasi yang selama ini dilakukan pemerintah perlu mempertahankan.”* (Mahdudin, Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Besarnya jumlah pinjaman yang disalurkan akan menentukan keuntungan yang diperoleh. Akan tetapi tidak berarti bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan besar akan memberikan keuntungan yang besar pula. Untuk itu perlu adanya sistem pemberian pinjaman dan tepat dan efektif yang diterapkan Usaha simpan pinjam agar tingkat pinjaman bermasalah dapat berkurang

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan, dalam kegiatan pelaksanaan Spp pemerintahan Desa Pulau Baru Kopah dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian mendokumentasikan untuk dijadikan SPJ dan arsip desa. Pihak BPD pun melakukan hal sama dengan mengecek dan memantau perkembangan pekerjaan apakah sesuai dengan anggaran perencanaan.

#### **6.2.4 Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan kondisi pendapatan masyarakat kearah yang lebih maju sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Suatu usaha utama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, dalam bidang ekonomi dan mendayagunakan kemampuan *life skill* (keahlian hidup) yang dimiliki oleh masyarakat.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pembangunan daerah terutama daerah yang sedang berkembang, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menngali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pengembangan ekonomi.

Dari hasil penelitian dilapangan, pada tahap pengembangan ekonomi desa didahului dengan sosialisasi dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan BPD,LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, pemberdayaan masyarakat alam bidang sosial ekonomi dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa. Hal ini sesuai apa yang diungkapkan oleh Bapak Mahyudin selaku kepala Desa Pulau Baru Kopah :

*“Tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam msyarakat dan meningkatkan pembangunan daerah pemerintah desa.”* (Mahyudin, Pulau Baru Kopah wawancara langsung,29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Pengembangan ekonomi masyarakat merupakan proses penguatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan. Sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan masyarakat juga dapat diartikan sebagai sebuah proses penyadaran dan penggalian potensi local masyarakat dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan mereka sehari-hari. Dengan memberdayakan masyarakat yang melalui penguatan kapasitas yang diperlukan untuk mengubah kualitas individu atau kelompok. Mengembangkan seluruh potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut pengamatan penulis bahwasannya pelaksanaan meningkatkan sosial ekonomi sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati saat musyawarah desa sudah terlaksana dengan baik. Dapat dilihat dari pelaksanaan dari hasil Musrembang yang terlaksana di Desa Pulau Baru Kopah dengan baik. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pebri Mayoka S.Pi selaku Sekretaris Desa Pulau Baru Kopah sebagai berikut:

*“pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian dan bisa untuk masyarakat Desa Pulau Baru Kopah, dan pada dasarnya harus dilaksanakan secara optimal dan terarah agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat.”*( Pebri Mayoka S.Pi Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat. Proses pengelolaan potensi juga harus dilakukan

dengan perencanaan dan strategi yang matang, karena proses tersebut mengkombinasikan sumber daya manusia dan alam sehingga terciptanya kesinambungan dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

Hasil dari pengamatan, pemerintah Desa Pulau Baru Kopah memberikan pemberitahuan ketika ada musyawara desa untuk perencanaan untuk pengelolaan pengembangan ekonomi kepada masyarakat sudahh baik. Dalam hal pemberitahuan kepada masyarakat, pemerintah desa Pulau Baru Kopah. . hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erwanis selaku Kasi Kesejahteraan Pulau Baru Kopah sebagai berikut:

*“Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan berkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang, dan pereekonomian diwujudkan kenaitan pendapatan nasional dalm perubahan dalam pengembangan ekonomi.”*(Erwanis Pulau Baru Kopah wawancara langsung,29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Dalam rangka pengembangan usaha dalam memberdayakan masyarakat maka paling tidak masyarakat dapat dilatih untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi tepat guna yang baik seperti pemanfaatan traktor tangan penggarapan lahan persawahan masyarakat. Bahwa pemerintah Desa Pulau Baru Kopah memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemanfaatan atau penggunaan teknologi tepat guna secara baik, teori yang dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis masalah ini adalah konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpuh pada manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik. Dalam meningkatkan

kemampuan memberdayakan masyarakat desa bertujuan untuk memampukan Desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan.

*“meningkatkan sesuatu yang ada, dan mendorong perkembangan sektor ekonomi potensial dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan membangun aspirasi terhadap masyarakat Desa Pulau Baru Kopah.”*(Mahdudin Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidak merataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi.

Berdasarkan dari wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwa semua pelaksanaan meningkatkan sosial ekonomi Desa Pulau Baru Kopah sudah terlaksana dengan baik, lancar dan aman. Dan masyarakat menilai pemerintah Desa Pulau Baru Kopah sudah transparan dan bertanggung jawab dalam meningkatkan pembangunan.

#### **6.2.5 Meningkatkan Kapasitas SDM di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu pemerintahan, disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh karena itu, kita harus membentuk strategi perancangan, pelaksanaan dan pemeliharaan untuk

mengelola manusia sehingga menjadi kinerja usaha yang optimal termasuk kebijakan pengembangan dan proses untuk mendukung strategi.

Kebijakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada masyarakat lapisan bawah atau masyarakat kecil yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, oleh sebagian besar masyarakat tersebut dalam memperbaiki atau meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui tiga jalur utama, melalui jalur pendidikan, melalui jalur pelatihan kerja, dan melalui jalur pengembangan karir.

Dari hasil penelitian di lapangan, pengembangan SDM seorang pekerja atau karyawan di suatu perusahaan maka bisa dilakukan pelatihan bagi orang tersebut. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu, dalam hal meningkatkan pengetahuan keterampilan yang dimiliki, serta sikap individu tersebut.

*“strategi pembangunan SDM suatu perencanaan dan kualitas dapat meningkatkan dan masyarakat diberikan pendidikan dalam sumber daya ekonomi seperti meningkatkan kebutuhan masyarakat”*(Hardianto Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB.

strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap pemerintahan, salah satu yang menunjang proses pembangunan SDM adalah aspek pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja, yang artinya suatu pengembangan yang sifatnya formal dan berhubungan langsung

Kemudian, untuk meningkatkan ekonomi SDM harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dan

lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sesuai dengan hasil wawancara Bapak Mahyudin selaku kepala Desa Pulau Baru Kopah :

*“staregi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang kearah yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan kerjanya. Serta memiliki loyalitas yang baik”* (Mahyudin Pulau Baru Kopah wawancara langsung,29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Pengembangan ekonomi masyarakat adalah suatu tujuan yang dimana titik fokusnya adalahh peningkatan taraf hidup indifidu dan kelompok, serta memberdayakan msasyarakat untuk meningkatkan SDM dan mengembangkan sesuatu yang ada, dalam proses ini sumber daya alam (SDA)dan sumber daya manusia (SDM) saling berkesinambungan mencapai tujuan.

Dalam hal pengetahuan masyarakat tentang perencanaan meningkatkan SDM masyarakat mengetahui apa saja perencanaan di Desa Pulau Baru Kopah dengan baik dengan melalui musyawarah desa yang dipinpin oleh kepala desa, masyarakat Desa Pulau Baru Kopah diberi pemaparan tentang kegiatan SDM yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa. dengan hasil wawancara Bapak Ropis,S.I.KOM selaku Operator Siskeudes Desa Pulau Baru Kopah :

*“Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan Organisasi terhadap kebutuhan akan Sumber Daya Manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langka yang dapat diambil guna mencapai tujuan”* (Ropis,S.I.Kom Pulau Baru Kopah wawancara langsung,29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Sumber daya manusia menjadi salah satu elemen yang paling penting selain modal dan teknologi dalam upaya mencapai tujuan pemerintah, maka dari itu karena pentingnya data tersebut maka Sumber Daya Manusia harus selalu dikembangkan. Ituhkah pentingnya perencanaan Sumber Daya Manusia, perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan dan keretsediaan pada

masa yang akan datang. baik jumlah maupun jenisnya sehingga SDM dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, pelatihan, dan aktifitas lainnya dengan baik

Dari hasil wawancara penulis dengan para informan, dalam kegiatan pelaksanaan Spp pemerintahan Desa Pulau Baru Kopah dilakukan oleh pemerintah desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat kemudian mendokumentasikan untuk dijadikan SPJ dan arsip desa. Pihak BPD pun melakukan hal sama dengan mengecek dan memantau perkembangan pekerjaan apakah sesuai dengan anggaran perencanaan.

*“Pemerintah Desa Pulau Baru Kopah meningkatkan SDM dengan cara melakukan pembinaan kepada masyarakat dan mengontrol kemampuan dan berpartisipasi dalam masyarakat dan dapat menunjang proses pengembangan SDM.”* (Pebri Mayoka S.Pi Pulau Baru Kopah wawancara langsung, 29 Juli 2021\_10.00 WIB)

Pembinaan Sumber Daya Manusia berarti kegiatan yang dilakukan terhadap keberadaan dalam suatu organisasi, agar mereka lebih berdaya guna dan berhasil dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Membantu Kepala Badan dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di Bidang pengembangan kompetensi teknis, kompetensi manajerial serta pembinaan dan penegakan disiplin pemerintah desa.

Tujuan diadakan pelatihan dan pengembangan SDM, mempengaruhi keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi memberikan kemampuan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tugas dalam bekerja sehingga hasil yang dicapai maksimal.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa dalam mengembangkan sosial ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan ingingi sudah berjalan dengan cukup baik, hhal ini dilihat dari dengan adanya musyawara Desa sebagai temperature pertukaran informasi antarpemerintah Desa dengan masyarakatdan juga pemerintahaan Desa yang sudah menyediakan dokumen APBDesa di Desa Pulau Baru Kopah, yaitu kurang terbuka informasi tentang anggaran pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Desa kepada masyarakat

.Upaya Pemerintah Desa Ulujangang dalam meningkatkan kesejahteraanmasyarakat yaitu melalui program pemberdayaan kelompok usaha seperti pengadaan bibit jagung, padi dan pupuk untuk petani serta penanaman pohon aren untuk pembuat gula merah dan jugapenyuluhan berupa peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan bagi pengrajin kursi dan lemari. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui program yang telah dilakukan pemerintrah Desa Ulujangang sebagaimana penulis telah uraikan diatas akan terus dilaksanakan sesuai perkembangan dan kemajuan zaman serta seiring semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya.

Pemerintah dalam hal ini perangkat Desa dituntut untuk selalu berperan aktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga tercapai tatanan masyarakat yang ideal.Oleh sebab itu, kerja sama yang baik antara

perangkat Desa dengan masyarakat sangat diperlukan guna memerangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator, mengarahkan masyarakat agar dapat mandiri, meningkatkan skill dan diri masyarakat.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalaah;

1. Dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat melalui memberdayakan ekonomi masyarakat untuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan atau memberdayaan ekonomi masyarakat lebih diperbanyak lagi untuk masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, karna masih banyak lagi masyarakat membutuhkan.
2. Bagi pemerintah Desa Pulau Baru Kopah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa dimulai dari memberdayakan masyarakat serta megembangkan ekonomi masyarakat. Adanya kesesuaian informasi tim pengawas dari pasukan birokrasi yang lebih tinggi dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menegetahui bagaimana memberdayakan masyarakat desa Pulau Baru Kopah.
3. Bagi akademis diharapkanmampu memberikan suatu hal yang baru dalam perkembangan ekonomi pada suatu pemerintahan Desa, masyarakat beserta lapisan masyrakat yang mampu menjalankan program pendapatan APBDes dengan jujur, baik, transparan dan sesuai dengan prosedur yang tela ditetapkan.

Diharapkan kepada pemerintah setempat agar memberikan perhatian yang lebih yang membawa manfaat besar demi kelangsungan cita-cita untuk menjadikan Desa Ulujangang mencapai kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*  
Yoogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ai Siti Farida, 2011, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badriyah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan 1. Bandung:  
CV Pustaka Setia
- Dra, H. Salidi Samsudin, M.M.M.Pd (2010) *Manajemen Sumber Daya Manusia*.  
Bandung Penerbit Puataka Setia
- Gordon, George, J, 1982. *Public Administration In America (ed. 2th)*. New  
York: St. Martin's Press.
- G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*  
Yoogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu S.P 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*,  
Bandung, PT. Bumi Aksa.
- H.A.W. W idjaja. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT.  
Raja Grafindo Persada.
- Hutomo Mardi Yatmo, 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi:*  
Tinjauan Teoritik dan Implementasi.
- Iskandaar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Social (Kualitatif dan Kuantitatif)*  
Gaung Persada Press. Jakarta
- Kansil dan Cristine Kansil, sinar Grafika 2001, *pemerintahan daerah di Indonesia*
- Manullang. 2009. *Dasar-dasar manajemen*. Yogyakarta : Gadjha Mada  
University Press
- Marbun, 2007. *Kamus Manajemen*. Media Pustaka, Jakarta
- Mifta Thoha, 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta :  
Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_, P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia* ( Edisi  
Pertama). Jakarta: Binapura Aksara

- Riduwan. 2009 *skala pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. *Metode penelitian sosial*. 2009. Bandung: PT. Refiks Aditama
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2009. *Dasar-dasar penelitian Kualitatif: Tata Langka dan Teknik-teknik Teoritisasi data*. Terjemahan Muh Shodiq & Imam Muttaqien, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Syafii, Inu Kencana, 2003. *System Administrasi Negara Republik Indonesia* Bandung: PT Bumi Aksara.
- Syamsir Torang. 2012. *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta
- Toto Mardikanto, Poerwowo, Soeboto, *pemberdayaan masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, ( Bandung : Alfabeta, 2013).
- Universitas Brawijaya, 2007, *Laporan Rektor Universitas Brawijaya pada dies Natalies ke 44 Universitas Brawijaya*. Malang. Hh.5-7.

#### **A. Undang-undang**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

### Lampiran 1. Dokumentasi penelitian



Kantor Kepala Desa Pulau Baru Kopah



Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Desa



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Operator Desa

**Realisasi Pelaksanaan APBDes 2020  
PEMERINTAH DESA PULAU BARU  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA PULAU BARU KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

| URAIAN                                                         | Ref. | ANGGARAN<br>(Rp.)       | REALISASI<br>(Rp.)      | LEBIH KURANG<br>(Rp.)  |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                                              |      |                         |                         |                        |
| Pendapatan Asli Desa                                           |      | 1.550.000,00            | 0,00                    | 1.550.000,00           |
| Pendapatan Transfer                                            |      | 1.254.439.000,00        | 1.254.439.000,00        | 0,00                   |
| Dana Desa                                                      |      | 783.625.000,00          | 783.625.000,00          | 0,00                   |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi                                 |      | 14.983.000,00           | 14.983.000,00           | 0,00                   |
| Alokasi Dana Desa                                              |      | 370.851.000,00          | 370.851.000,00          | 0,00                   |
| Bantuan Keuangan Provinsi                                      |      | 85.000.000,00           | 85.000.000,00           | 0,00                   |
| Pendapatan Lain-lain                                           |      | 0,00                    | 656.949,00              | 656.949,00             |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                       |      | <b>1.255.989.000,00</b> | <b>1.255.995.949,00</b> | <b>893.051,00</b>      |
| <b>BELANJA</b>                                                 |      |                         |                         |                        |
| BIDANG PENYELENGKAPAN PEMERINTAHAN DESA                        |      | 418.525.616,00          | 418.623.609,00          | 3.502.107,00           |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA                            |      | 279.431.225,00          | 279.341.225,00          | 90.000,00              |
| BIDANG PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN                             |      | 58.457.000,00           | 58.457.000,00           | 0,00                   |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT                                 |      | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                   |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN<br>KESEKUTUPAN DESA |      | 464.910.000,00          | 457.050.000,00          | 7.860.000,00           |
| <b>JUMLAH BELANJA</b>                                          |      | <b>1.219.323.841,00</b> | <b>1.207.471.734,00</b> | <b>11.852.107,00</b>   |
| <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                                     |      | <b>36.665.159,00</b>    | <b>37.824.215,00</b>    | <b>(10.959.056,00)</b> |
| <b>BAYAN</b>                                                   |      |                         |                         |                        |
| Bantuan Pembiayaan                                             |      | 14.334.841,00           | 14.334.841,00           | 0,00                   |
|                                                                |      | 51.000.000,00           | 51.000.000,00           | 0,00                   |
|                                                                |      |                         | <b>(36.665.159,00)</b>  | <b>0,00</b>            |

Baliho Pengumuman Pemerintah Desa



Stuktur Organisasi Desa Pulau Baru Kopa

## Lampiran 2. Daftar Wawancara

### DAFTAR WAWANCARA

#### UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN BIDANG SOSIAL EKONOMI DI DESA PU;AUBARU KOPAH KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

---

##### A. Identitas Diri

Nama : YESI OKTORIA  
NIM : 170411079  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

##### B. Identitas Informan

Nama :  
Usia :  
Jenis Kelamin :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Nama Desa : Pulau Baru Kopah

##### c. Petunjuk Kegiatan

1. Daftar pertanyaan ini hanya bermaksud untuk penulisan skripsidan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah pertanyaan dengan benar dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerjasamanya Bapak/Ibuk saya ucapkan terima kasih.

## Daftar Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa

### Pemberdayaan masyarakat

1. Bagaimana sosialisasi program yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pulau Baru Kopah?

---

---

---

---

2. Bagaimana respon pemerintah Desa Pulau Baru terhadap program pemberdayaan yang ada?

---

---

---

---

3. Apakah ada kerja sama/keterlibatan pemerintah desa Pulau Baru dengan pihak ketiga/ swasta dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

---

---

---

---

4. Apa yang dilakukan pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

---

---

---

---

**Memperbaiki akses jalan**

1. Apakah pemerintah Desa Pulau Baru Kopah selalu melakukan pengawasan dalam memperbaiki akses jalan?

---

---

---

---

2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPD terhadap pelaksanaan memperbaiki akses jalan?

---

---

---

---

3. Berapa besarkah pengaruh yang terjadi pada masyarakat bila terjadi pembangunan di Desa Pulau Baru Kopah

---

---

---

---

4. Apakah pelaksanaan memperbaiki akses jalan Desa Pulau baru Kopah berjalan dengan lancar?

---

---

---

---

**Menerapkan Dana simpan pinjam**

1. Apakah pemerintah Desa Pulau Baru Kopah telah merumuskan anggaran terhadap simpan pinjam?

---

---

---

---

2. Bagaimana bentuk aspek keuangan dana simpan pinjam Desa Pulau Baru Kopah?

---

---

---

---

3. Apakah kepala Desa Pulau Baru Kopah menetapkan anggaran bersama BPD dalam menerapkan dana simpan pinjam?

---

---

---

---

4. Berapa anggaran dana yang dirumuskan oleh pemerintah Desa untuk simpan pinjam tersebut?

---

---

---

---

**Pengembangan ekonomi masyarakat**

1. Bagaimana cara pemerintah Desa Pulau Baru Kopah mengembangkan ekonomi masyarakatnya?

---

---

---

---

2. Bagaimana caranya pemerintah Desa mengembangkan potensi desa tersebut?

---

---

---

---

3. Bagaimana caranya pemerintah Desa Pulau Baru Kopah menghadapi perekonomian sekarang?

---

---

---

---

4. Apa yang harus dilakukan pemerintah Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pulau Baru Kopah?

---

---

---

---

**Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM**

1. Strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah Desa Pulau Baru Kopah agar pengembangan SDM berjalan dengan efektif?

---

---

---

---

2. Bagaimana cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu masyarakat?

---

---

---

---

3. Sumber daya apa saja yang potensial di Desa yang jika dimanfaatkan dengan maksimal dapat menunjang perekonomian masyarakat?

---

---

---

---

4. Bagaimana sistem perencanaan SDM di Desa Pulau Baru Kopah?

---

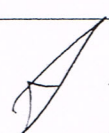
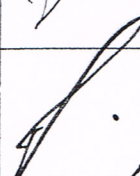
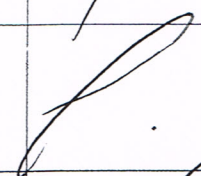
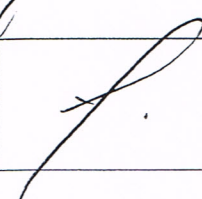
---

---

---

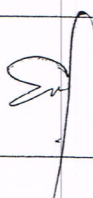
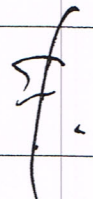
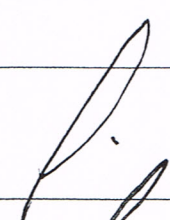
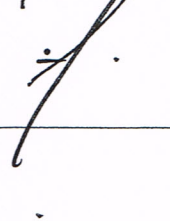
## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YESI OKTARIA  
 NPM : 170411079  
 PEBIMBING 1 : EMILIA EMHARIS,S, SOS, M,SI  
 PEBIMBING 11 : SARJAN,M,SOS, M,SI  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM  
 MENGEMBANGKAN SOSIAL EKONOMI DI DESA PULAU BARU  
 KOPAH KECAMATAN KUATAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN  
 SINGINGI

| NO | TGL/<br>BLN/THUN | MATERI KONSULTASI                                  | PARAF<br>PEBIMBING 1 | PARAF<br>PEBIMBING 11                                                                 |
|----|------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 21/12-2020       | COVER DAN judul<br>paragraf 2 gsm                  |                      |   |
| 2  | 28/12-2020       | masalah dan latar<br>belakang dalam jls            |                      |  |
| 3  | 1/4-2020         | masalah belum<br>tengambar dan latar belakang      |                      |  |
|    |                  | Revisi no halaman<br>sebelumnya yg sudah           |                      |  |
| 4  | 4/4-2021         | Revisi kalimat<br>pulang pada latar belakang       |                      |  |
| 5  | 6/4-2021         | Cori ke bagian teori yg<br>pas atau kerangka pikir |                      |  |

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YESI OKTARIA  
 NPM : 170411079  
 PEBIMBING 1 : EMILIA EMHARIS,S, SOS, M,SI  
 PEBIMBING 11 : SARJAN,M,SOS, M,SI  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM  
 MENGEMBANGKAN SOSIAL EKONOMI DI DESA PULAU BARU  
 KOPAH KECAMATAN KUATAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN  
 SINGINGI

| NO | TGL/<br>BLN/THUN | MATERI KONSULTASI                | PARAF<br>PEBIMBING 1                                                                  | PARAF<br>PEBIMBING 11                                                                 |
|----|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 22/01/20         | pubacking judul penelitian       |   |                                                                                       |
|    |                  | tersebut dan after penulisan     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2. | 2                | Cari upaya penunjang lainnya     |  |                                                                                       |
| 3. | 23/3-2021        | Pertemuan latar belakang masalah |                                                                                       |  |
| 4  | 20/4-2021        | dan akan di submit               |                                                                                       |  |
|    | 15/01/20         | Buat BAB W dan after wawancara.  |  |                                                                                       |

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YESI OKTARIA

NPM : 170411079

PEBIMBING 1 : EMILIA EMHARIS, S. SOS. M. SI

PEBIMBING 11 : SARJAN M, S. Sos M.SI

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN BIDANG SOSIAL

EKONOMI DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN KUANTAN

TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

| NO | TGL/<br>BLN/THUN | MATERI KONSULTASI                                             | PARAF<br>PEBIMBING 1 | PARAF<br>PEBIMBING 11 |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1  | 1/7-2021         | hal 54 tabel 4.1<br>Sumber dari mana                          |                      |                       |
|    |                  | buat daftar<br>warisan dari L                                 |                      |                       |
|    |                  | Time Gupuz.                                                   |                      |                       |
| 2  | 8/7-2021         | Revisi daftar warisan                                         |                      |                       |
| 3. | 5/8-2021         | Revisi pembahasan BAB<br>IV                                   |                      |                       |
| 4. | 9/8-2021         | Pembahasan di segmaitkan<br>dengan buku panduan               |                      |                       |
| 5. | 11/8-2021        | Pertajaman hasil pen-<br>elitian analisis hasil<br>penelitian |                      |                       |
|    |                  | Pembahasan daftar<br>portalnya sesuai<br>asjad                |                      |                       |

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : YESI OKTARIA

NPM : 170411079

PEBIMBING 1 : EMILIA EMHARIS,S. SOS. M. SI

PEBIMBING 11 : SARJAN M, S. Sos M.SI

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN BIDANG SOSIAL  
EKONOMI DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN KUANTAN  
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

[illegible]

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

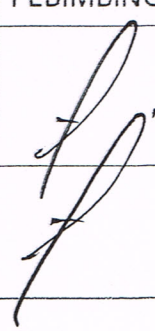
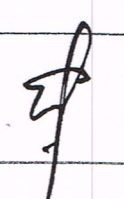
NAMA : YESI OKTARIA

NPM : 170411079

PEBIMBING 1 : EMILIA EMHARIS, S. SOS. M. SI

PEBIMBING 11 : SARJAN M, S. Sos M.SI

JUDUL SKRIPSI : UPAYA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN BIDANG SOSIAL  
EKONOMI DI DESA PULAU BARU KOPAH KECAMATAN KUANTAN  
TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

| NO | TGL/<br>BLN/THUN | MATERI KONSULTASI                                 | PARAF<br>PEBIMBING 1                                                                  | PARAF<br>PEBIMBING 11                                                                |
|----|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 16/8-2021        | Perbaiki tulisan dan<br>penggunaan daftar pustaka |                                                                                       |  |
|    | 18/8-2021        | Ada atk di aj                                     |                                                                                       |                                                                                      |
|    |                  | Ceritakan kembali<br>salun skripsi                |  |                                                                                      |
|    |                  |                                                   |                                                                                       |                                                                                      |
|    |                  |                                                   |                                                                                       |                                                                                      |
|    |                  |                                                   |                                                                                       |                                                                                      |
|    |                  |                                                   |                                                                                       |                                                                                      |
|    |                  |                                                   |                                                                                       |                                                                                      |



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH  
KANTOR KEPALA DESA PULAU BARU**

*Jl. Lingkar Desa Pulau Baru kode pos 59562*

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 459/SKIP-PB/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAHYUDIN

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Pulau Baru Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yesi Oktaria

NPM : 170411079

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Studi : S1 Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi

Menindak Lanjuti Permohonan Pelaksanaan Riset Nomor : 266/FIS/UNIKS/VIII/2021 tentang “Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Bidang Sosial Ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah Kabupaten Kuantan Singingi”. Pada saat ini telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang dimohonkan.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan di: Desa Pulau Baru

Pada Tanggal : 13 Agustus 2021

Kepala Desa Pulau Baru





**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail [unikskuantan@gmail.com](mailto:unikskuantan@gmail.com)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI**

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Yesi Oktoria

NPM : 170411079

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Sosial Ekonomi di Desa Pulau Baru Kopah

Hari/Tgl Ujian : Jum'at/ 08 Oktober 2021

Dinyatakan sudah melakukan **revisi** atas skripsinya.

| NO | NAMA DEWAN SIDANG           | JABATAN                  | TANDA TANGAN |
|----|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. | Zul Ammar, SE.,ME           | Ketua Dewan Sidang       | 1.           |
| 2. | Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si | Pembimbing 1             | 2.           |
| 3. | Sarjan.M, S.Sos.,M.Si       | Pembimbing 2/ Sekretaris | 3.           |
| 4. | Desriadi, S.Sos., M.Si      | Anggota 2                | 4.           |
| 5. | Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si  | Anggota 2                | 5.           |

**Catatan:**

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**NOMOR : 110/Kpts/FIS/UNIKS/XII/2020**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
  2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
  3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menunjuk :
    - a. Nama : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I
    - b. Nama : Sarjan, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Yesi Oktaria

NPM : 170411079

Judul Skripsi : Analisis Upaya Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Sosial Ekonomi Di Desa Pulau Baru Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN  
PADA TANGGAL : 01 DESEMBER 2020  
Dekan,

Zul Ammar, SE., ME  
NIDN. 1020088401

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip

## **BIODATA DIRI**

### **Identitas Diri**

Nama : YESI OKTORIA  
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Baru, 12 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Rumah : Dusun Tanjung Baru, Desa Pulau Baru Kopah  
Telepon rumah dan HP : 082268652359



### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

#### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 028 Pulau Baru Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi
2. SMP Negeri 6 Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi
3. SMA Negeri 2 Teluk Kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya

Teluk Kuantan, 12 Oktober 2021

**YESI OKTORIA**  
**NPM. 170411079**